



**RENJA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTDA SETDA MALUKU
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku Tahun 2022 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku di masa yang akan datang pada khususnya.

Ambon, April 2021
**Kepala Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah
Setda Maluku,**



D.N Kaya, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690906 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Analisis Kinerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD	25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD	28
3.3. Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2021 dan 2022	31

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Analisis Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2020	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja dan Capaian Target Biro Pemerintahan Sesuai IKK 2020	21
Tabel 2.3 Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	25
Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Tahun 2022	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun. Renja OPD sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah.

Rancangan Renja OPD berisi program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Program dan kegiatan dalam Rancangan Renja OPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan tersebut, disusun Rancangan Renja Biro Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa setiap OPD diwajibkan menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan mengacu pada RKPD.

Rancangan renja Biro Pemerintahan Setda Maluku disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

.Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

- 13) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 14) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan strategis Biro Pemerintahan Setda Maluku untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku adalah untuk memasukkan program/ kegiatan beserta proyeksi pagu indikatif yang ada dalam Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

1.6. Landasan Hukum

1.7. Maksud dan Tujuan

1.8. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.6. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.8. Review terhadap Rancangan Awal OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.5. Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan secara menyeluruh dan cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan renja Biro Pemerintahan Setda Maluku tahun 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Analisis Kinerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku

Pada tahun 2020 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.110.808.606,- dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, yang digunakan untuk membiayai 9 program dan 27 kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Maluku serta satu program dan kegiatan yang didanai dari dana APBN. Adapun proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.011.902.693 dan capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 73,27%

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran program ini adalah Rp.548.610.106,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 89.14%.

Indikator program : terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output kegiatan : tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output

Output kegiatan : tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

c. Penyediaan makanan dan minuman

Output kegiatan : tersedianya makanan dan minuman rapat selama 12 bulan.

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Output kegiatan : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sebanyak 13kali.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

e. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output kegiatan : 15 Kali

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran program ini adalah Rp.72.850.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 51.62%.

Indikator program : terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output kegiatan : tersedianya suku cadang, BBM dan perawatan kendaraan 1 unit kendaraan dinas/operasional.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Output kegiatan : terawat dan terpeliharanya 6 unit AC dan printer.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran program ini adalah Rp. 5.000.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 80 %.

Indikator program : meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 0 %.

Program ini diimplementasikan melalui

kegiatan Bimtek sosialisasi lokakarya dan workshop.

Output kegiatan : Peningkatan dan Penguatan sumber daya aparatur pemerintah melalui bimtek, sosialisasi, lokakarya dan workshop

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 0%.

4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Pagu anggaran program ini adalah Rp.1.671.698.500,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 43 %.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Rapat Koordinasi Pejabat Daerah Gubernur Bersama Bupati dan Walikota se-maluku

Output kegiatan : Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati /Walikota se- Maluku

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 0%. Dikarenakan Rasionalisasi Anggaran

- b. Koordinasi dan Fasilitasi Keanggotaan APPSI

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

Output kegiatan : Pembayaran iuran APPSI Kegiatan sebesar 100 %.

5) Program Penataan Daerah Otonom Baru

Pagu anggaran program ini adalah Rp. 534.350.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 93.20%.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar

96 %. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

Output kegiatan : tersedianya 13 Dokumen DOB

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- b. Koordinasi percepatan penyerahan P3D

Output kegiatan : Tersedianya Dokumen P3D pada 11 Kab/ Kota

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- c. Koordinasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Output kegiatan : Tercapainya Kesepakatan antara Kabupaten Buru selatan terkait tapal batas

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- d. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum

Output kegiatan : Terbentuknya Tersedianya 1 Dokumen data Wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku

- e. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan : Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

f. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah

Output kegiatan : Terlaksananya Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 0 %. Capaian Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan Rasionalisasi Anggaran

6) Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

Pagu anggaran program ini adalah Rp.72.400.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 90,52 %.

Pembinaan dan pembakuan nama rupa bumi di Provinsi Maluku

Output kegiatan : Tersedianya 1 Dokumen data unsur rupa bumi di kab/kota di Provinsi Maluku

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

7) Program Perbaikan Proses Politik

Pagu anggaran program ini adalah Rp.0,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 0%.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 0 %.

Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

Koordinasi Monitoring Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas

Output kegiatan : terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 0 %. Capaian Target Realisasi Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Rasionalisasi Anggaran

8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran program ini adalah Rp.345.400.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 92 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi Supervisi dan evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kemendagri

Output kegiatan : Laporan Pelaksanaan Dekon Provinsi Maluku

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- b. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di kabupaten/kota

Output Kegiatan : Pelaksanaan PATEN pada 5 Kecamatan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 0 %. Dikarenakan tidak tercapainya Target Realisasi Anggaran dan Kegiatan

- c. Monitoring dan Evaluasi Pengisian Jabatan Camat

Output Kegiatan : Tersedianya Laporan Kinerja Kecamatan di Provinsi Maluku

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- d. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan di kabupaten/kota

Output Kegiatan : Tersedianya Laporan Kinerja Kecamatan di Provinsi Maluku

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

9).Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pagu anggaran program ini adalah Rp.808.500.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 99 %. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan, yaitu :

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH

Output kegiatan : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan KDH

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

10). Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pagu anggaran program ini adalah Rp. 99.125.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 96.93 %. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pertanahan

Output kegiatan : terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan pertanahan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- b. Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur pemerintahan

Output kegiatan : 3 Lokasi Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Analisis Kinerja
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		OUTPUT	OUTCOME	URUSAN	KETERANGAN
			Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.078.994	21.075.000	99,98	Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.625.000	27.625.000	100	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor selama 12 bulan	Kenyamanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
3.	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.720.000	6.500.000	34,72	Tersedianya Makanan dan Minuman selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin kantor	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
4.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	163.200.112	173.386.112	100	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Kementerian terkait sebanyak 10 kali	Meningkatnya sinergitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	144.600.000	129.805.000	89,77	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kab/kota	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
6.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	173.386.112	173.386.112	100	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Guna Kelancaran Aktifitas Kantor	Meningkatnya Kelancaran Aktifitas Perkantoran	Otonomi Daerah, Kepegawaian	

RENCANA KERJA OPD 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana							
7	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.350.000	26.349.748	62,22	Terawat dan terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
8	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.500.000	11.255.000	36,90	Terawat dan terpeliharanya 6 Unit AC ,5 unit Laptop, laptop dan printer	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
9	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Lokarya dan workshop	5.000.000	0	0	-	-	Otonomi Daerah, Kepegawaian	
IV	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
10	Koordinasi dan Fasilitas Keanggotaan APPSI	95.560.000	90.560.000	94,7	luran APPSI selama 1 tahun	Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam keanggotaan APPSI	Reformasi dan Birokrasi	
11	Rapat Koordinasi Pejabat daerah Gubernur Bersama Bupati/Walikota se-Maluku	-	-	-	-	-	Reformasi dan Birokrasi	
12	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi KDH/WKDH dan DPRD	1.576.138.500	730.956.499	40,63	Terlaksananya PAW Anggota DPRD, Izin Cuti Kampanye KDH, WKDH serta ,Tugas Luar Negeri KDH,WKDH	Pengusulan PAW, Cuti Kampanye KDH,WKDH, Tugas Negeri KDH, WKDH	Reformasi dan Birokrasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	Program penataan daerah otonomi baru							
13	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	33.200.000	29.948.000	90,2	tersediaanya 3 Dokumen DOB antara lain ,Kabupaten Kei Besar, kabupaten aru perbatasan, kabupaten kepulauan Banda.	Terfasilitasinya penyiapan data informasi pendukung proses pemekaran	Otonomi Daerah	
14	Koordinasi percepatan penyerahan P3D	63.900.000	55.617.500	87,4	Tersedianya Dokumen P3D pada 11 Kab/ Kota	Tersedianya dokumen P3D	Otonomi Daerah	
15	Koordinasi percepatan penyelesaian batas daerah di Provinsi Maluku	75.650.000	70.833.900	93,6	Tercapainya Kesepakatan antara Kabupaten buru-buru selatan terkait tapal batas	Tercapainya kesepakatan	Bina Administrasi Kewilayahan	
16	Pelaksanaan HUT Otonomi Daerah di Provinsi Maluku	-	-				Otonomi Daerah	
17	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	125.100.000	113.913.700	91,6	Tersusunnya Kode dan data Wilayah Provinsi Maluku	Dokumen Kode dan data wilayah provinsi maluku	Bina Administrasi Kewilayahan	
18	Koordinasi Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	175.000.000	163.513.000	93,4	1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Otonomi Daerah	
VI	Program Pembakuan Nama Rupa Bumi							
19.	Pembinaan dan pembakuan rupa bumi di Provinsi Maluku	96.000.000	95.060.000	99	Tersedianya 1 Dokumen data unsur rupa bumi di kab/kota di Provinsi Maluku	Dokumen data unsur rupa bumi di Kab/Kota di Provinsi Maluku	Bina Administrasi Kewilayahan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah							
20	Koordinasi supervisi dan evaluasi penyelenggaraan Dekon TP lingkup Kementerian Dalam Negeri	98.000.000	88,875.000	90,7	1 Dokumen Data Kerjasama antar daerah	Dokumen kerjasama antar daerah	Bina Administrasi Kewilayahan	
21	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan kab/kota	104.800.000	89.190.300	85,1	Tersedianya Laporan 118 Kecamatan di Provinsi Maluku	Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Maluku	Bina Pemerintahan Desa dan Kecamatan	
22	Koordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	92.600.000	87,655.900	94,7	Pelaksanaan PATEN pada 5 Kecamatan	Terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan	Bina Pemerintahan Desa Kecamatan	
23	Monitoring Pengisian Jabatan Camat	68.675.000	63.786.600	92,8	Pengisian Jabatan Camat yang sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pasal 224	Jabatan Camat yang sesuai peraturan berlaku	Bina Pemerintahan Desa Kecamatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	Program perbaikan proses politik							
24	Koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	-	-	100			Otonomi Daerah	
IX	Program Penataan Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
25	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pertanahan	41.925.000	40.735.600	97,1	Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan pertanahan	Lancarnya pelaksanaan kebijakan pertanahan	Bina Administrasi Kewilayahan	
26	Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur pemerintahan	57.200.000	55,343.000	96,7	3 Lokasi Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan	Pembangunan infrastruktur pemerintahan	Bina Administrasi Kewilayahan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH							
27	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH	808.500.000	808.500.000	100	Terlaksananya Pengendalian Kebijakan KDH yang berkualitas	Terevaluasinya Pengendalian KDH dalam kurun waktu 1 Tahun	Otonomi Daerah	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perencanaan Kinerja Merupakan Proses Penyusunan Rencana Kerja Sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan Tahunan.

Kinerja Pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan otda setda maluku dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat ditanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang memadai. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda maluku akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur ,seperti meningkatkan pola karir ASN yang terarah, pemenuhan hak-hak pegawai, penyediaan aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya updating data secara berkesinambungan dan secara umum tercapai sesuai target kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja dan Capaian Target Biro Pemerintahan Sesuai IKK 2020

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	Ket
1	Persentase Dokumen Persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang dianalisis	50 %	100 %	
2	Presentase Penyerahan/ Pelimpahan P3D	70 %	100	
3	Persentase Kabupaten/Kota Yang dibina dalam Penerapan PATEN	18,18 %	0	
4	Cakupan koordinasi, fasilitasi, pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	100 %	0	

--	--	--	--	--

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otda Setda

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretariat Daerah Maluku berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Pemerintahan.

Susunan organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku berdasarkan pasal 6 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020, Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
 - 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut, pasal 8, disebutkan bahwa Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Tata Pemerintahan, dalam Melaporkan

pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dijelaskan bahwa Biro Pemerintahan Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai optimalisasi target-target pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan pelaksanaan pemantauandan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan layanan administratif kepada pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

- Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai maupun Perangkat Daerah;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan di hadapkan dengan isu strategis, yang dapat diklasifikan atas isu yang terkait dengan lingkungan internal dan isu lingkungan eksternal. Isu strategis lingkungan internal meliputi :

- 1) Belum optimalnya perencanaan sumber daya aparatur baik dari aspek kuantitas maupun kualitas (kompetensi);
- 2) Masih belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- 3) Kurangnya ASN Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan Tugas Tugas Biro Pemerintahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

TABEL 2.3

PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1		<p data-bbox="1032 489 1533 604">Program Penunjang Urusan Pemerintahan</p> <p data-bbox="1032 615 1533 772"><i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ol data-bbox="1081 804 1533 1035" style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p data-bbox="1032 1129 1533 1234"><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></p> <ol data-bbox="1081 1266 1533 1371" style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <p data-bbox="1032 1392 1533 1497"><i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></p> <ol data-bbox="1081 1528 1533 1686" style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

	<p>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MUTU LAYANAN PUBLIK</p>	<p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i> <i>Penunjang Urusan Pemerintahan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaranan Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<p><i>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 3. Fasilitasi Penataan Wilayah
		<p><i>Pelaksanaan Otonomi Daerah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 3. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		<p><i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah2. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
--	--	---

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju terciptanya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta akuntabel perlunya pematapan manajemen pemerintahan dan pengelolaan administrasi publik.

Reformasi manajemen pemerintahan di Indonesia diawali dengan terbitnya Ketetapan MPR-RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditekankan pada pengutamaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah. Secara umum, asas akuntabilitas menekankan agar setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun. Renja OPD sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Recana Kerja OPD merupakan penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD. Dengan demikian tujuan dan sasaran Renja OPD

merupakan pengejawantahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD.

Secara konkrit tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Pemerintahan Setda Maluku, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana perkantoran yang representatif.

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan beberapa program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- (2) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Terwujudnya Sarana dan parasaran aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas

Perwujudan dari sasaran strategis ini telah di upayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan sub Kegiatan kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Perwujudan dari sasaran strategis ini telah di upayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Sub kegiatan yaitu : Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Perwujudan terhadap sasaran strategi ini telah diupayakan melalui pelaksanaan beberapa program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program : **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Fasilitasi Kerjasama antar pemerintahan.
- (2) fasilitasi administrasi KDH/WKDH dan DPRD

5. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan batas daerah serta kebijakan penataannya

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Sub kegiatan yaitu :

(1) Fasilitasi Penataan Wilayah.

6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi pemekaran daerah, pelaksanaan daerah otonom yang semakin handal dan berkualitas.

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program : **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Fasilitasi Penataan Wilayah.

(2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

(3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

(4) fasilitasi administrasi KDH/WKDH dan DPRD

(5) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

7. Memverifikasi Penamaan Unsur Rupa Bumi dan Nama Pulau

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program : **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Sub kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

8. Memfasilitasi pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang semakin berkualitas dan demokratis.

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program : **Perbaikan Proses Politik.** dengan kegiatan yaitu : Koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.

9. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Perwujudan terhadap sasaran strategis ini telah diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan. Program dimaksud adalah : **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.** dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2021 dan 2022

Sebagai penjabaran dari Renstra OPD serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022, maka disusun program dan kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana terlampir

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Output	Ke t	OPD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.960.011	Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.558.696	Tersedianya Jasa Tenaga Umum Pelayanan Umum Kantor (6		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku

			orang)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.100.000	Tersedianya Jasa Penggandaan Selama 1 Tahun		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.459.000	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Biro Pemerintahan		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.380.000	Terselesaikanny a Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional Kantor		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Pemeliharaan/Rehabilita	23.140.000	Service/		Biro

	si sarana dan prasaranan Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perbaikan AC, Laptop dan Printer Kantor		Pemerintahan dan Otda Setda Maluku
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	139.999.554	Jumlah Kabupaten/Kota Pelaksanaan PATEN		Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	139.997.392	Tersusunya Laporan Kode dan Data Wilayah Provinsi Maluku		Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku
	Fasilitasi Penataan Wilayah	32.829.514.743	Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah, penyelesaian Penegasan Batas Daerah, Penyediaan Lahan dalam		Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku

			Rangka Mendukung Prioritas Nasional LIN, Tersedianya daftar Nominatif pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah, tersedianya daftar objek redistribusi tanah reforma agraria yang telah ditetapkan oleh kab/kota		
	Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	372.027.224	Terlaksnannya Administrasi KDH/WKDH, DPRD Rakor Gub bersama Bupati/Walikota se-Maluku		Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	224.496.446	Pelaksanaan hari HUT Otda, penyerahan dan Pengalihan P3D		Biro Pemerintahan dan Otda Setda

			secara bertahap, Terlaksananya Rapat koordinasi pembakuan Rupa Bumi		Maluku
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	789.646.727	Tersusunya Dokumen LPPD Provinsi Maluku, Jumlah Jabatan Camat yang sesuai dengan UU yang berlaku, Terevaluasinya Dokumen ELPPD Provinsi Maluku, Evaluasi Kinerja Kecamatan selama 1 Tahun		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				
	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	1.127.646.990	Keikutsertaan Pemprov Maluku dalam kegiatan APPSI ,Terwujudnya Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku

			Provinsi Lain		
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	1.065.572.841	Terlaskanya Rekomendasi Tim Pakar Gubernur		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	74.999.029	Tersusunya Laporan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah		Biro Pemerintah n dan Otda Setda Maluku
		37.203.498.65 3			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai penjabaran Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Maluku, dan berfungsi untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Penyusunan Renja ini bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Rumusan program dan kegiatan di dalam Renja tahun 2022 didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pemerintahan daerah dan berbasis pada isu-isu strategis yang memerlukan prioritas penanganan serta berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi dan investasi.

Melalui Renja tahun 2022 ini, diharapkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari visi dan misi Biro Pemerintahan Setda Maluku akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Ambon, April 2021

**Kepala Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Setda
Maluku,**



**D.N Kaya, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690906 198902 1 002**